KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

		FINAL/TIDAR FINAL			1.72.2.			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 3 3 5			H.4 X Final			
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 1 5 6 9 5 4 7 6 0 7 2 2 0 0 0								
A.2 NIK : A.2 NIK								
A.3 Nama : HARI JUMADI								
3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
2	21-402-01	1.172.700	1.172.700	0	5	58.635		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota  B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 33								
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 3 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor : Tanggal								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0								
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
C.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4 Tanggal :		2 3 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.5 Nama Penandatangan : HARI JUMADI								
C.6 Pernyataan	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	mengatur bahwa dol	kumen ini tela	ah ditandatangani secara		

R1ZHDEY4